

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bidang perdagangan, hubungan antara Indonesia dengan Australia telah mengalami masa-masa yang cukup sulit untuk berjalan sesuai dengan tujuan mereka. Walaupun kondisi geografis yang sangat dekat, hal tersebut tidak menjamin bahwa hubungan kedua negara berjalan dengan baik, tentu sangat disayangkan jika dengan letak geografis kedua negara yang cukup dekat tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, khususnya dalam hal kepentingan ekonomi. Melihat kepentingan ekonomi Indonesia dan Australia yang tentunya berbeda, hal ini sudah seharusnya prioritas utama mereka adalah bergerak bersama sebagai mitra perdagangan internasional. Artinya, dengan menjadikan perdagangan internasional sebagai acuan oleh kedua negara, secara tidak langsung dengan hubungan perdagangan tersebut akan muncul sebuah harmonisasi kembali dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi masing-masing negara.

Untuk itu dengan momentum yang mulai terbangun, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi yang nanti tentunya akan meningkatkan nilai perdagangan kedua belah pihak negara serta memajukan perekonomian, yakni melalui kerangka kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Namun ternyata sebelum adanya kerjasama IA-CEPA ini, Indonesia dan Australia pernah tergabung kedalam AANZFTA (ASEAN-Australia and New

Zealand Free Trade Agreement). Yang mana dalam hal ini perjanjian kerjasama tersebut telah ditandatangani sejak tahun 2010. Oleh karena itu, segala bentuk kerjasama atau kerangka kerja melalui IA-CEPA, akan tetap mematuhi acuan berdasarkan (Canberra, 2020) yang telah disepakati terlebih dahulu didalam AANZFTA oleh Indonesia dan Australia. Akan tetapi, banyak sekali persepsi bahwa AANZFTA kurang memberi dampak positif terhadap perekonomian kedua negara.

Dapat kita ketahui bahwa terdapat tiga cakupan utama menurut (Kemlu, 2016) dalam kerjasama IA-CEPA, adapun tiga poin tersebut adalah sebagai berikut, (1) Momentum, dalam hal ini dapat dinilai bahwa dengan adanya kerjasama IA-CEPA, momentum kedua negara kembali terbangun untuk melakukan harmonisasi kembali dalam peningkatan perekonomian serta nantinya akan berperan secara langsung sebagai *Global Value Chain*. (2) Kemitraan, artinya adalah dalam kerjasama IA-CEPA ini, tidak selamanya bidang ekonomi menjadi tujuan utama Indonesia dan Australia, terdapat faktor lain yang sudah seharusnya difokuskan kedalam kerangka kerja sebagai mitra selain membahas tentang barang, jasa, ekspor, impor serta investasi. Hal-hal lainnya adalah *Higher Educational, Health Sector and Vocational Education Training*. (3) Keuntungan, tujuan akhir yang ingin dicapai kedua negara adalah mencapai keuntungan yang seimbang, yang mana dalam negosiasi IA-CEPA ini, nantinya diharapkan dapat membangun keuntungan untuk jangka waktu yang panjang, sehingga dapat diimplementasikan untuk 5 hingga 10 tahun kedepan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa perjanjian dan kerjasama IA-CEPA telah melalui sebanyak 12 kali putaran, terhitung sejak tahun 2010. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga akan dibahas pada pembahasan nantinya. Namun secara teknis, putaran pertama IA-CEPA terjadi pada tahun 2012 karena pada 2011 kondisi Indonesia dan Australia sedang dalam keadaan yang tidak baik, mengingat kasus ekspor-impor sapi yang berakibat langsung dengan tertundanya putaran pertama. Hasil dari putaran pertama adalah membahas tentang dasaran awal seperti prinsip, tujuan dan prosedural IA-CEPA itu sendiri. Kemudian putaran kedua pada 2013 secara umum membahas tentang pembahasan kerja sama ekonomi kedua negara dan keterlibatan para pencetus kebijakan.

Lalu setelah putaran kedua telah berlangsung, negosiasi IA-CEPA mengalami pemberhentian sementara. Pemberhentian kerja sama ini adalah akibat dari kasus penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan (Beritasatu, 2016) setelah pemberhentian berlangsung dengan kurun waktu antara 2013 hingga 2016, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo serta Australia melalui Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull sepakat untuk membuka kembali kerjasama yang sempat tertunda (Reaktivasi). Hal ini tentu bukan tanpa tujuan, karena pada tahun 2016 putaran ketiga berlangsung secara langsung untuk kemudian menentukan titik fokus kepada kerja sama yang lebih komprehensif dan lebih modern.

Dilanjutkan ke putaran empat dan lima yang lebih detail membahas tentang perdagangan barang dan jasa serta investasi jangka panjang, kerja sama ekonomi dan kerangka kerja kelembagaan. Pada putaran ini yang menarik untuk dilihat

adalah upaya kedua negara dalam membuka akses pasar barang dan jasa, dimana jika kita melihat perbandingan jumlah penduduk, Australia lebih memiliki jumlah pasar yang lebih luas di Indonesia dibandingkan dengan Indonesia ke Australia. Tentu hal ini akan menjadi tantangan yang cukup signifikan terhadap kepentingan ekonomi Indonesia dalam kerjasama IA-CEPA.

Putaran enam, tujuh dan delapan terjadi pada tahun 2017 (Februari-Agustus). Topik yang dibahas pada putaran keenam adalah revisi dalam pembukaan akses pasar oleh kedua negara, putaran ketujuh menandai dimulainya akses pasar investasi kedua negara serta pada putaran kedelapan, Indonesia dan Australia masih membahas hal yang sama dengan komitmen mereka untuk menyelesaikan kerangka kerja mereka dalam kerja sama IA-CEPA pada akhir tahun 2017.

Kemudian putaran kesembilan dan sepuluh diselenggarakan pada bulan oktober hingga november 2017. Pada putaran ini, Menteri perdagangan Indonesia pada saat itu Enggartiasto Lukita turut serta dan ikut mendesak untuk para negosiator dan delegasi agar segera cepat merampungkan dan menyelesaikan negosiasi IA-CEPA. Secara keseluruhan pada putaran kesembilan dan kesepuluh masih membahas hal yang sama yakni seputar barang, jasa, investasi serta kerangka kerja. Namun karena masih belum menemukan akhir yang diinginkan, akhirnya putaran kesebelas dan dua belas diselenggarakan pada Desember 2017 hingga Juli 2018.

Pembahasan yang dibawa pada putaran sebelas dan dua belas adalah perampungan untuk mengakhiri kerjasama IA-CEPA dan penulisan teks hukum kedalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tentu sebelum penulisan teks hukum

kedua belah pihak negara telah melalui proses peninjauan kembali. Yang menarik adalah bahwa dalam putaran akhir ini secara teknis Indonesia telah mengizinkan perusahaan asing memiliki 67% saham di bidang pendidikan. Sehingga hal ini juga menandakan bahwa fokus atau kepentingan Indonesia tidak hanya untuk perekonomian, namun juga menyangkut pendidikan dan kesehatan. Penandatanganan IA-CEPA dilaksanakan di Istana Negara, Indonesia. Pada tanggal 2 Agustus 2018, dan telah secara resmi disepakati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertulis, penulis akan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut. **“Apa kepentingan ekonomi Indonesia terhadap reaktivasi IA-CEPA periode 2016-2018?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi Ujian Proposal Hubungan Internasional.
2. Untuk mengetahui komitmen masing masing negara khususnya Indonesia dalam IA-CEPA.
3. Untuk mengetahui kepentingan nasional Indonesia dalam IA-CEPA serta komoditas utama Indonesia bagi.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang Indonesia dalam menjalankan kepentingan ekonomi dengan Australia di IA-CEPA setelah proses reaktivasi pada tahun 2016.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 National Interest

Konsep kepentingan nasional tentu memiliki berbagai macam definisi yang berbeda, dalam hubungan Internasional tentu gagasan ini erat kaitannya dengan kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*). Dasaran ini yang kemudian menjadi sebuah tradisi politik dalam politik internasional sehingga saat ini konteksnya berubah menjadi tujuan fundamental dan faktor penentu tiap aktor negara dalam membuat kebijakan luar negerinya dan salah satunya adalah sebagai penentu arah bentuk kerjasama IA-CEPA . Tentu hal hal yang paling vital dalam kepentingan nasional sebagai kebutuhan negara adalah pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005 :35). Kepentingan nasional tentu merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh negara dalam tatanan politik internasional, tujuan-tujuan ini senantiasa berhubungan langsung dengan hal-hal yang dicita-citakan khususnya kesejahteraan (*prosperity*) (Rudy, 2002 : 116)

Namun yang perlu menjadi catatan bahwa kepentingan nasional tidak semata merta ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan suatu negara,

pencapaian kepentingan nasional juga harus didasari dengan kapabilitas negara itu sendiri, kapabilitas yang menjadi salah satu tolak ukur kekuatan sebuah negara adalah kemampuan dan kekuasaan mereka dalam memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi yang dibuat untuk mencapai kepentingan nasional, kemampuan dan strategi negara juga perlu adanya kesinambungan antara kemampuan dan potensi domestik untuk hubungannya dengan negara lain agar tercipta sebuah interaksi seperti halnya kemitraan ekonomi melalui IA-CEPA ini (Rudy, 2002: 116)

Sebagaimana gagasan utama mengenai kepentingan nasional yang cenderung meluas dengan berbagai perspektif hubungan internasional, salah satunya yakni sudut pandang konsep *National Interest* menurut Martin Wight dan Hedley Bull bahwa setiap tindakan dan aktivitas antar negara dalam tatanan politik internasional akan memunculkan sebuah aturan dan perintah baru terkait dengan setiap kepentingan masing masing negara, hal ini juga memungkinkan hubungan antar negara tidak selalu diisi dengan konflik melainkan hubungan baik yang konsisten dan stabil.

Mereka percaya bahwa tatanan internasional memiliki kepentingan nasionalnya masing masing dan didefinisikan oleh negara bukan karena posisi mereka independen dan berjalan sendiri, namun dibangun dan berkembang atas dasar saling mengakui adanya kepentingan negara lain serta kepedulian terhadap dampak atas segala tindakan yang diambil terhadap entitas lain. Pada akhirnya, kepentingan nasional didefinisikan atas eksistensi dari negara lain, serta memungkinkan adanya tatanan masyarakat internasional yang lebih baik dan stabil.

Mengacu pada momentum antara Indonesia dan Australia melalui IA-CEPA, dapat dikatakan bahwa masing-masing negara telah menyetujui untuk bersama membangun perekonomian dua arah lebih baik, artinya konsep *National Interest* merupakan jembatan penghubung antara Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA yang harus tetap diperkuat dan diseimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan bersama mengacu pada bentuk komitmen yang telah diratifikasi bersama, demi mencegah berbagai konflik agar kerja sama Indonesia dan Australia tidak mengalami pembekuan seperti yang telah terjadi pada IA-CEPA periode sebelum tahun 2016.

Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo telah menunjukkan keaktifannya dalam beberapa pelaksanaan diplomasi yang cukup memberi kesan bahwa kepentingan nasional Indonesia dapat diraih melalui signifikansi diplomasi secara bilateral maupun multilateral sehingga dengan hal ini tentu menjadi catatan bagi tatanan internasional, stabilitas ekonomi melalui penguatan kekuatan maritim Indonesia yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo tentu akan berdampak pada IA-CEPA karena salah satu kunci dari kemitraan ini adalah perdamaian, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan kawasan.

1.4.1.2 Tactical Issue Linkage

Menurut Ernest B. Haas, pengetahuan dan kepentingan sosial tidak akan berjalan secara satu misi dan tentu akan lebih fleksibel atau mengalami perubahan, untuk itu dalam *Issue Linkage* para peneliti dituntut untuk melihat negosiasi dilihat dengan berbagai isu-isu yang ada agar mencapai kesepakatan bersama (Haas E.B,

1980). Untuk lebih mendalami landasan konsep *Issue Linkage* oleh Ernest B. Haas, berikut merupakan pengkategorian atau pengklasifikasian pendekatan *Issue Linkage* menjadi tiga bagian, yakni (1) *Substantive Issue Linkage*, merupakan pendekatan yang lebih fokus menggunakan kekuatan intelektual sebagai penghubung masalah sehingga negosiasi yang dicapai akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar, sebagai contoh sederhana adalah bagaimana seorang ilmuwan, ekonom, insinyur Amerika Latin bergabung menjadi satu untuk mencapai kesepakatan kemajuan teknologi (Haas E.B, 1980). (2) *Tactical Issue Linkage*, merupakan sebuah pendekatan negosiasi yang menghubungkan isu ekonomi dengan ekonomi, maupun ekonomi dengan non-ekonomi yang nantinya akan mencapai *quid pro quo* melalui proses perjanjian dan tawar menawar antar negara. (3) *Fragmented Issue Linkage*, adalah upaya penyatuan isu yang fokusnya untuk mencapai tujuan sosial utama melalui sumber daya dan sebab-akibat sehingga dapat tetap mempertahankan negosiasi kedua belah pihak negara (Haas E.B, 1980).

Dalam membantu proses analisa lebih lanjut, Ernest B. Haas membagi beberapa tahapan dalam *issue linkage* menjadi beberapa bagian; (1) masalah dan isu, (2) menggabungkan masalah, (3) cakupan masalah. Kaitannya dengan judul ini penulis juga mengklasifikasi sebagai berikut (1) masalah ekonomi yang terjadi, (2) komitmen dan pembahasan kerjasama IA-CEPA, (3) kepentingan ekonomi Indonesia dalam reaktivasi IA-CEPA.

Dalam konsep *Issue Linkage*, secara umum Ernest B. Haas membagi aktor yang terlibat ke dalam dua kategori, yakni *Linker* dan *Linkee*, yang mana *Linker* merupakan sebuah istilah yang diberikan terhadap aktor negara yang sedang

bernegosiasi namun negara tersebut cenderung memiliki *power* atau kekuatan lebih baik dari pihak lainnya, *Linker* nantinya akan menawarkan kebijakan dan kepentingannya kepada pihak *Linkee*, sebaliknya *Linkee* memiliki posisi yang cenderung lemah sehingga hanya akan menerima dan memilih tawaran dari *Linker*.

Melihat studi kasus yang dituliskan oleh penulis mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, penulis mengklasifikasikan Australia sebagai *Linkee* dan Indonesia sebagai *Linker*. Klasifikasi ini berasal dari kenyataan bahwa Australia memiliki akses yang lebih luas ke pasar internasional dan jumlah pasar sasaran yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Indonesia. Jaringan perdagangan Australia yang luas dan integrasi ekonomi dengan berbagai kawasan memungkinkannya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dalam negosiasi perdagangan global. Sementara itu, Indonesia dengan akses yang relatif terbatas ke pasar perdagangan menemukan posisi reaktif, mencari peluang untuk memperkuat posisi ekonominya. Asimetri ini menjadi dasar kerangka analitis yang digunakan dalam studi ini, khususnya melalui *Tactical Issue Linkage* sebuah pendekatan strategis dalam negosiasi internasional dimana negara-negara berusaha untuk memajukan kepentingan mereka dengan menghubungkan isu-isu yang terpisah diseluruh negosiasi. Dengan mengelompokkan Australia sebagai *Linkee* pada dasarnya pihak yang didekati dan Indonesia sebagai *Linker* pihak yang memulai pendekatan, studi ini menyiapkan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan atau menanggapi keseimbangan ekonomi yang ada.

Tactical Issue Linkage yang diterapkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis yang berharga untuk memahami motivasi dan perilaku strategis Indonesia.

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk membedah serangkaian isu ekonomi yang saat ini dihadapi Indonesia seperti ketidakseimbangan perdagangan, atau kebutuhan akan diversifikasi pasar yang lebih besar. Dengan mengidentifikasi tantangan ekonomi ini dan mengevaluasi urgensinya, penelitian ini berfokus pada bagaimana tantangan tersebut berkontribusi dalam membentuk kepentingan nasional Indonesia khususnya untuk peninjauan kembali IA-CEPA. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memetakan keterkaitan antara berbagai isu ekonomi yang dihadapi Indonesia, seperti ketidakseimbangan neraca perdagangan bilateral, ketergantungan pada komoditas ekspor tradisional, serta perlunya diversifikasi pasar dan sektor ekspor sebagai respon terhadap dinamika ekonomi global. Dengan mengidentifikasi dan mengkaji tantangan-tantangan tersebut berdasarkan urgensinya, penelitian ini menyoroti bagaimana isu-isu ekonomi domestik diartikulasikan dalam agenda kebijakan luar negeri, dan secara spesifik, bagaimana hal tersebut mendorong Indonesia untuk meninjau kembali implementasi IA-CEPA.

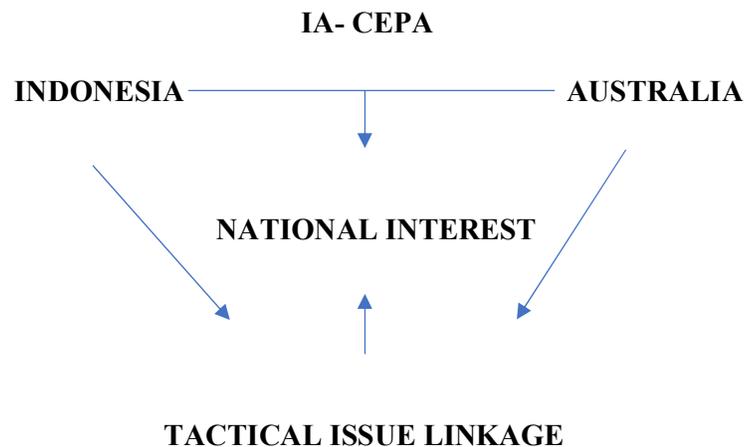
Lebih lanjut, pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa dalam hubungan internasional, negara tidak selalu bertindak dalam kerangka isu tunggal, melainkan kerap mengaitkan satu isu dengan isu lainnya demi mendapatkan posisi tawar yang lebih menguntungkan. Dalam konteks ini, Indonesia memanfaatkan kerangka IA-CEPA bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan ekspor atau menarik investasi asing, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengatasi permasalahan struktural dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, *Tactical Issue Linkage* tidak hanya relevan sebagai pendekatan teoretis, tetapi juga sebagai

kerangka konseptual yang aplikatif dalam memahami dinamika kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin pragmatis dan berorientasi pada hasil konkret dalam pembangunan ekonomi nasional.

Mereaktivasi kembali perjanjian ini dapat memberikan Indonesia akses baru ke pasar Australia dan memperbaiki ketentuan kerjasama ekonomi, yang penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi domestiknya. Dengan demikian, *Tactical Issue Linkage* tidak hanya memberikan perbedaan struktural dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Australia tetapi juga mendorong Indonesia untuk terlibat kembali dalam diplomasi ekonomi melalui IA-CEPA.

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran



Sumber: diolah oleh penulis

(1) IA-CEPA telah membuka kembali momentum kemitraan antara Indonesia dan Australia pasca proses reaktivasi kembali (2) Dalam proses kerjasama IA-CEPA, munculnya kepentingan ekonomi masing masing negara khususnya Indonesia tentu akan menimbulkan pro dan kontra serta baik dan buruk untuk kedua belah pihak negara (3) Dengan pendekatan menggunakan teori *tactical issue linkage* nantinya akan membantu membuka apa sebenarnya *national interest* Indonesia dalam reaktivasi IA-CEPA dan apakah sejalan dengan kepentingan ekonomi Australia.

Dari kerangka diatas penulis menggambarkan bahwa dengan menggunakan pendekatan teori *Tactical Issue Linkage*, Indonesia dan australia tentu memiliki permasalahan ekonomi, sehingga dari penggabungan isu ekonomi tersebut akan muncul kepentingan nasional masing-masing negara, dengan hal ini IA-CEPA

bertindak sebagai jembatan penghubung terkait dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh kedua negara khususnya Indonesia, hingga nantinya muncul negosiasi bersama dalam proses perjanjian dan tawar menawar untuk terciptanya kesepakatan bersama.

Permasalahan dan isu ekonomi yang di alami Indonesia tentu akan menjadi fokus *National Interest* bagi mereka, melihat peluang dan kedekatan secara geografis dengan Australia momentum ini diharapkan membawa dampak yang positif. Seperti pada penjelasan sebelumnya di latar belakang dan mengacu pada rumusan masalah, fokus penulis adalah menganalisis lebih dalam apa sebenarnya kepentingan ekonomi Indonesia dalam reaktivasi IA-CEPA.

1.6 Argumen Utama

Di tengah persaingan global, kedekatan secara geografis antara Indonesia dan Australia dirasa perlu untuk membangun kembali hubungan bilateral kedua negara, terlepas dari berbagai macam konflik baik ekonomi maupun non-ekonomi, tentu kemitraan kedua negara melalui IA-CEPA memiliki tujuan bersama dan kepentingan nasional yang berbeda. Sejak awal peluncuran negosiasi IA-CEPA pada 2010. Indonesia masih terbilang cukup lemah dari segi data ekspor dan impor, hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih belum mampu untuk bersaing di pasar bebas.

Untuk membantu daya saing di pasar global khususnya Australia maupun pasar regional Indonesia sendiri, tentu membutuhkan penarikan investasi yang sifatnya produktif salah satunya dengan memperkuat komoditi utama yang sifatnya

berkelanjutan. Namun Indonesia tidak bisa hanya berat sebelah mementingkan upaya mereka untuk pasar global dengan kemampuan dan kapasitas produk Indonesia, Indonesia juga perlu melindungi pelaku usaha nasional guna memastikan adanya sinergi kepentingan dalam negeri beserta sumber daya negara yang kemudian nantinya dapat diolah secara efektif (*effective resources sharing*) untuk pasar global khususnya untuk memperkuat kepentingan nasional Indonesia di IA-CEPA.

Tentunya Indonesia harus dapat memberikan dan memanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan seluruh rakyatnya, maka dibutuhkan komitmen kerja sama yang dapat memajukan perekonomian secara masif dan berkelanjutan di berbagai sektor melalui kerja sama internasional perdagangan, jasa dan investasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia-Australia kembali mereaktivasi IA-CEPA dan telah diratifikasi pada 2020, gagasan kemitraan yang dikemas kedalam perjanjian kerja sama *Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement* juga telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai bentuk kerja sama ekonomi dengan prinsip kemitraan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan jenis riset kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif melalui studi literatur, kalimat-kalimat tertulis serta nantinya diolah dan dianalisis untuk ditarik kedalam sebuah kesimpulan (Sarwono, 2006). Terkait dengan judul ini, penulis akan lebih banyak untuk mempelajari studi pustaka dari

berbagai sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini sebelumnya. Penulis juga akan mengumpulkan sumber melalui dokumen, buku, jurnal, berita, laporan, *website* dll yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang sudah tertulis (Umar, 2012)

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada judul ini secara umum diambil dari kurun waktu tahun 2016 hingga 2018, pada tahun 2016 merupakan titik awal setelah proses reaktivasi IA-CEPA, yang mana hingga pada akhirnya di tahun 2018 kerjasama IA-CEPA telah disepakati secara teknis. Cakupan penelitian yang difokuskan adalah politik perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia, bentuk diplomasi ini cukup menarik untuk dibahas karena juga menyangkut beberapa isu non-ekonomi dalam proses kerja sama IA-CEPA. Penulis akan menganalisis salah satu negosiasi terpanjang dari sejarah Indonesia dan pada rentang waktu tertentu dibagi menjadi dua bagian periode, namun yang menjadi fokus penulis adalah periode setelah reaktivasi.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan sumber data melalui sumber data sekunder, baik jurnal, buku dan karya ilmiah yang nantinya akan digunakan sebagai bentuk studi pustaka terkait dengan judul penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam proses ini, penulis akan mengatur dan merencanakan struktur penelitian, dimulai dari pra riset hingga sampai ke laporan riset, perlu menjadi catatan bahwa prosedur ini dilakukan untuk memudahkan dan nantinya menjadi sebuah panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Berikut beberapa prosedur yang akan dijalani:

1. Pra Riset

Dalam tahapan ini, penulis akan membaca dan memahami bahan bacaan maupun berita yang sesuai dengan judul penelitian yang diambil. Dalam hal ini juga mencakup segala aspek persiapan kegiatan riset.

2. Pengambilan Data

Setelah melalui proses pra riset, penulis akan mengambil beberapa data dari sumber sekunder untuk kepentingan penelitian sebagai bentuk upaya studi literatur. Tentu dalam hal ini, penulis akan memilih dan melihat kredibilitas dan reputasi sumber supaya tidak terjadi kesalahan data terkait dengan judul penelitian. Sumber sekunder yang diambil bisa dari buku, jurnal, berita, *website* dsb.

3. Analisis Data

Setelah melalui dua proses tersebut, penulis akan menganalisa data dalam rancangan riset kualitatif. Berikut beberapa poin penting proses ini:

- a. Mengorganisir dan menyiapkan data, pada tahap ini penulis memfokuskan pada pengumpulan semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

- b. Membaca semua data, dalam memahami isi data yang telah didapatkan dan dikategorikan, penulis perlu membaca dan memahami secara menyeluruh inti dari data tersebut, dalam tahapan ini mungkin memerlukan beberapa adaptasi untuk melakukan penyesuaian data dengan keterkaitan topik yang dibahas, tujuan utama dalam tahapan ini adalah untuk memilih materi terkait dan mengidentifikasi pernyataan-pernyataan serta argumen terkait dengan judul.
- c. Mengaitkan tema, pada tahapan ini melibatkan proses korelasi antara tema dan kategori
- d. Interpretasi, selanjutnya merupakan tahapan terakhir dalam proses analisa data yang telah dikumpulkan dalam riset penulis untuk menafsirkan makna data sesuai dengan parafrase maupun tindakan menjelaskan sesuatu dari dokumen terkait.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I akan berisi pendahuluan, judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian dan daftar pustaka sementara terkait dengan topik proposal skripsi yang diajukan.

BAB II akan berisi pembahasan terkait kerjasama IA-CEPA antara Indonesia-Australia dan sejarah hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Australia.

BAB III akan berisi tentang kepentingan ekonomi Indonesia dalam reaktivasi IA-CEPA.

BAB IV akan berisi tentang kesimpulan dan saran.